



**SALINAN**

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU  
NOMOR : 1 TAHUN 2006  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBENUR RIAU

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Propinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor 21/SKB/IX/2005  
903/UM/2005-10/985

Pada tanggal 28 Bulan September 2005, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
19. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24);
20. Peraturan daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU  
DAN  
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan .....	Rp. 2.800.141.658.395,00
2. Belanja .....	Rp. 3.188.585.303.427,42
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan .....	Rp. 457.823.970.823,00
b. Pengeluaran .....	Rp. 69.380.325.790,58
Surplus/Defisit .....	Rp. (388.443.645.032,42)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi RAPED menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV : Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Daerah
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Inventasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Nilai Aktiva Tetap Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Daerah
10. Lampiran X : Neraca Daerah Propinsi Riau Desember 2005

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku. Surut sejak tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Tanggal

GUBERNUR RIAU  
Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan dalam lembaran daerah Propinsi Riau  
Tanggal  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

Ttd

H.R MAMBANG MIT  
Pembina Utama Madya  
Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR